

**PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP
AKUNTABILITAS PUBLIK (STUDI KASUS
PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN
BAJENG KABUPATEN GOWA)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP
AKUNTABILITAS PUBLIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN
DESA KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

LAKSMI PRIHATININGSIH

NIM: 105731129117

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Sarjana
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022 M/1443 H

22/01/2022

1 cap
Sub. Alu mmi

P/0118/AGT/2200

PR1

P²

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP
AKUNTABILITAS PUBLIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN
DESA KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

LAKSMI PRIHATININGSIH

NIM: 105731129117

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Sarjana
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2022 M/1443 H

02/01/2022

1 Cap
Smb. Akuntansi

P/0118/AKT/2200

PRJ

P¹

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Akan ada yang dikorbankan untuk setiap level yang kau raih, entah itu waktu, materi, tenaga, dan pikiran.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunia-Nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin

Skripsi ini sebagai persembahan kecil untuk kedua orang tuaku tercinta karena doanya yang tidak pernah henti hingga sekarang, dan orang-orang yang saya sayangi serta almamater biru yang saya banggakan

PESAN DAN KESAN

Tidak ada keberhasilan yang mudah, tapi juga tidak ada kerja keras yang sia-sia



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Pengaruh *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa).

Nama Mahasiswa : Laksmi prihatiningsih

NIM : 105731129117

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 08 Januari 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Jumadil Awal 1443 H
09 Januari 2022 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Wa Ode Rayyani, SE., M.Si., Ak.CA
NIDN. 0900047902

Basri Basir MR, SE., M.Ak
NIDN. 092609890

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NIDN. 0902116503

Mira, SE., M.Ak
NIDN. 0903038803



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: **Laksmi prihatiningsih**, NIM: **105731129117** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: **587/105/A.I-II/1/43/2022**, Tanggal **28 Jumadil Awal 1443 H / 05 Januari 2022 M**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Jumadil Awal 1443 H
09 Januari 2022 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Pengawas Umum | Prof. Dr. H. Ambo Asse, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua | Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris | Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
(WDI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji | 1. Dr. Muchnana Muchran, SE., M.Si, Ak.CA
2. Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
3. Mira, SE., M.Ak, Ak
4. Linda Arizanty Razak, SE., M.Si., Ak.CA |  |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 861 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Laksmi prihatiningsih**
Stambuk : 105731129117
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Skripsi : **"Pengaruh Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik
(Studi Kasus Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa"**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang Saya Ajukan di Depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat oleh Siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Jumadil Awa 1443 H
09 Januari 2022 M

mbuat Pernyataan,



Laksmi Prihatiningsih
NIM.105731129117

Diketahui Oleh:

Dekan



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM. 1288 844

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa).

Skripsi yang penulis susun ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak H.Hamid dan ibu Hj.Fatimah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan untuk keluarga yang ada di Makassar maupun di Dompu terima kasih atas segala dukungan dan doa restu yang telah diberikan kepada penulis demi keberhasilan dalam menuntut ilmu. Dan terima kasih juga untuk Muh Notriansyah yang selalu menyemangati dan menemani sampai akhir penyelesaian. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, SE,MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Wa Ode Rayyani, SE., M.Si, Ak.CA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Basri Basir MR, SE., M.Ak, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu dan meluangkan waktunya selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten/Konsultan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah, banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi angkatan 2017 terkhusus teman kelas Akuntansi 17H dan Akuntansi Sektor Publik 3 yang selalu belajar bersama baik offline maupun online yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Kepala Desa dan segenap Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang dengan senang hati menerima penulis untuk melakukan kegiatan penelitian ini.
10. Ibu dari Yunitasari yang telah menerima penulis selama melakukan penelitian.
11. Sahabat ku Eka Marlina Fajar, Mursyidati Winda Ramardhani, Isnaeni Nur Aliya, Yunitasari yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaraan, motivasi, serta dukungannya sehingga penulis dapat meranmpungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamter tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabillil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.



ABSTRAK

Laksmi Prihatiningsih (2021) , Pengaruh Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa), Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Wa Ode Rayyani dan Pembimbing II Basri Basir.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Value For Money (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas) dapat mempengaruhi Akuntabilitas Publik pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatory research.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada variabel Ekonomi tidak terdapat pengaruh secara parsial antara *Ekonomi* terhadap Akuntabilitas Publik, ini berarti didukung dengan adanya tanggapan responden yang menunjukkan bahwa rata-rata Kantor Desa yang ada di kecamatan Bajeng dalam menjalankan/melaksanakan kerja-kerja organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Value For Money. Sedangkan pada variabel Efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara Konsep Value for money dalam aspek efisiensi terhadap Akuntabilitas Publik. Pada variabel Efektivitas menunjukkan bahwa terdapat tidak pengaruh secara parsial antara Konsep Value for money dalam aspek efektivitas terhadap Akuntabilitas Publik.

Kata Kunci : Value For money, Akuntabilitas Publik

ABSTRACT

Laksmi Prihatiningsih (2021), *The Influence of Value For Money on Public Accountability (Case Study of Bajeng District Government of Gowa Regency)*, Thesis accounting study program of the Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by I Wa Ode Rayyani and Mentor II Basri Basir.

This research aims to test whether Value For Money (Economy, Efficiency, Effectiveness) can affect Public Accountability in Village Government in Bajeng District of Gowa Regency. The type of research used is quantitative research with an explanatory research approach.

The results of this study show that in economic variables there is no partial influence between economics and public accountability, this means supported by the response of respondents who showed that the average village office in Bajeng sub-district in carrying out organizational work has been carried out in accordance with the principles of Value For Money. While in the variable efficiency of the results of the study showed that there is a positive and partially significant influence between the Concept of Value for money in the aspect of efficiency to Public Accountability. The Effectiveness variable shows that there is no partial influence between the Concept of Value for Money in the aspect of effectiveness to Public Accountability.

Keywords: Value For Money, Public Accountability

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN KEABSAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tinjauan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teoritis	6
B. Tinjauan Empiris	16
C. Kerangka Konsep	23
D. Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN	28

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Definisi Operasional dan Pengukuran	28
D. Populasi dan Sampel	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Analisis.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu	16
Tabel 3.1	Pengukuran Variabel	26
Tabel 4.1	Sebaran data Penelitian	48
Tabel 4.2	Deskripsi Karakteristik Responden	48
Tabel 4.3	Uji Validasi Variabel	50
Table 4.4	hasil Uji Reliabilitas	51
Tabel 4.5	Ringkasan hasil Estimasi Regresi	54



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Skematis Value For Money	11
Gambar 2.2	Kerangka Konsep	21
Gambar 4.1	Pemerintahan Desa	44
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas Data	52
Gambar 4.3	hasil Uji Heteroskedastisitas	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah. Untuk itu setiap daerah harus mampu menjalankan roda organisasi dengan baik, transparan dan akuntabel yang goalnya akan mengarahkan pada tujuan pemerintah yaitu tercapa tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*). Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat atas dasar UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 25 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *Good Governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel.

Sektor publik seringkali dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institute yang merugi. Tuntutan ini muncul agar organisasi sektor publik lebih memperhatikan *value for money* yang digunakan sebagai bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga keuangan kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan akuntabilitas publik. Penggunaan prinsip *value for money* dapat digunakan untuk memperbaiki anggaran sektor publik. Dengan konsep ini, bisa mendapatkan informasi mengenai indikator apakah dana telah dibelanjakan serta mampu menghasilkan nilai tertentu.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bagian dari kewajiban mempertanggungjawabkan tata kelola organisasi, baik itu dalam konteks keberhasilan organisasi maupun kegagalan organisasi dalam

melaksanakakan misi lembaga dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mardiasmo (2018) juga menjelaskan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *Value for Money* (VfM) dalam menjalankan aktivitasnya. Semua lembaga atau organisasi publik, mengharuskan lembaga pemerintahan melaksanakan kewajiban berupa akuntabilitas publik, tidak terkecuali Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Oleh karena itu, rendahnya penerapan dimensi *Value for Money* menyebabkan tingkat akuntabilitas pemerintah menurun dan meningkatkan risiko berinvestasi serta mengurangi kemampuan berkompetisi dengan organisasi sektor publik lainnya yang sejenis (Abdullah, 2018).

Lebih lanjut Renyowijoyo (2019) menjelaskan untuk melihat pelaksanaan *Value for Money* untuk meningkatkan akuntabilitas publik dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya capaian bobot persentase realisasi indikator kinerja berdasarkan bobot persentase sasaran/target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi sektor publik selama tahun berjalan dimana jika capaian bobot persentase realisasi indikator kinerja lebih rendah dari capaian bobot persentase sasaran/target indikator kinerja berarti pelaksanaan *Value For Money* nya masih rendah, begitupun sebaliknya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa capaian bobot persentase realisasi indikator kinerja dan capaian bobot persentase sasaran/target indikator kinerja Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang masih rendah, sehingga masyarakat menganggap Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa merupakan

instansi sektor publik yang tidak efisien dan tidak efektif dalam menggunakan dan mengelola sumber daya yang dipercayakan publik. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas maka berbagai penelitian mengenai penerapan dimensi *Value For Money* telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan penerapan dimensi *Value For Money* untuk terwujudnya proses akuntabilitas publik.

Penelitian tentang *Value For Money* telah banyak dilakukan, diantaranya adalah Abdullah (2018) mengemukakan bahwa pertanggungjawaban/ akuntabilitas publik dapat tercapai dengan baik apabila pemerintah dapat menggunakan dan mengelola aktivitas sumber daya secara Efektif/ Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Senada dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan Abdullah (2018) juga menemukan bahwa pelaksanaan konsep *Value For Money* sudah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi unsur Ekonomis, Efisien dan Efektif yang dibuktikan dengan kinerja keseluruhan dari kegiatan fisik irigasi Donggala Kodi Tahun 2014 telah mampu menyelenggarakan kegiatan secara ekonomis dengan rasio ekonomi rata-rata dibawah 100% atau hanya 99,90% dari total anggaran yang dianggarkan. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Demirag dan Khadaroo (2018) dengan menggunakan empat pengukuran kriteria akuntabilitas yaitu, keterandalan (*warrantability*),

traktabilitas (*tractability*), keterukuran (*measurability*), dan kelayakan (*feasibility*) menyimpulkan perbaikan pada akuntabilitas akan meningkatkan *Value for Money* pada *Private Finance Initiative* (PFI) UK.

Berdasarkan latar belakang di atas serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengangkat judul "**Pengaruh *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ekonomi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Pemerintahan desa kecamatan bajeng kabupaten gowa ?
2. Apakah efisiensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Pemerintahan desa kecamatan bajeng kabupaten gowa ?
3. Apakah efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Pemerintahan desa kecamatan bajeng kabupaten gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah ekonomi dapat mempengaruhi akuntabilitas Publik di Pemerintahan desa kecamatan bajeng kabupaten gowa.
2. Untuk menguji apakah efisiensi dapat mempengaruhi akuntabilitas publik di Pemerintahan desa kecamatan bajeng kabupaten gowa.
3. Untuk menguji efektivitas dapat mempengaruhi akuntabilitas publik di Pemerintahan desa kecamatan bajeng kabupaten gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan, pengetahuan serta keilmuannya dalam bidang akuntansi, khususnya untuk akutabilitas kinerja pada sektor pemerintahan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak institusi dalam hal ini adalah pemerintah Pemerintahan desa kecamatan bajeng kabupaten gowa bahwa konsep value for money dapat mempengaruhi kinerja dari institusi publik, sehingga dapat membuat regulasi atau kebijakan yang dapat memaksimalkan kinerja dan meminimalkan praktek value for money ini.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. *Theory Of Planned Behavior*

Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan serta kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu, Ajzen (2018).

Theory Of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku dan karyawan khususnya aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dariperilakunya tersebut, kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran aparatur desa terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara, dimana pada dasarnya mereka menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, akan tetapi mereka terkadang mencoba mengelak dan mengabaikan.

2. Value For Money

a. Pengertian *value for Money*

Suharto (2019: 121), menjelaskan bahwa *Value for money* sebagai nilai dari uang untuk melihat apakah uang dari organisasi tersebut bisa mendapatkan manfaat dari barang atau jasa dari sumber daya yang disediakan pada saat itu sekaligus memperhitungkan campuran kualitas, biaya, penggunaan sumber daya serta kebugaran dengan melihat ketepatan waktu dan kenyamanan dalam mencapai tujuan.

Imperial College London (2019) *Value for money* adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa dalam sumber daya yang tersedia. Ini tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, ketepatan waktu dan kenyamanan untuk menilai nilai barang dan jasa. *Value for money* memiliki tiga aktivitas utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Senada dengan konsep diatas, Suharto (2018) juga menyatakan bahwa *value for money* dinilai dalam 3 aspek yakni: ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas.

b. Konsep *value for Money*

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo 2018 : 130)

Indikator Dalam *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Maruliasmo (2018) menjelaskan bahwa Indikator *Value for Money* dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dimana ekonomi merupakan perolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan yang seharusnya. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input} \times 100\%}{\text{Input Value}}$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

Sedangkan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut (Renyowijoyo, 2019):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output} \times 100\%}{\text{Input}}$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Mardiasmo, 2019).

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka

semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome*.

Nordiawan (2018) menjelaskan bahwa hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2019 hal. 134).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Outcome} \times 100\%}{\text{Output}}$$

Ketentuan:

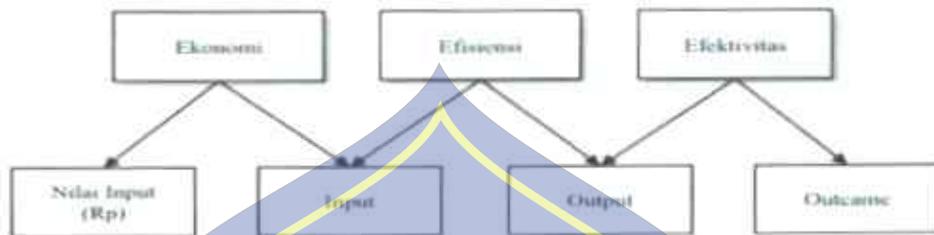
Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektivitas berimbang

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ketiga pokok bahasan dalam *value for money* sangat terkait satu dengan lainnya. Ekonomi Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skematis Value For Money
 Sumber: (Mardiasmo, 2009, hal. 5)



Gambar 2. 1 Skematis Value For Money

a) Masukan (*input*)

Merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Sebagai contoh: dokter di RS, tanah di jalan, guru di sekolah, dan sebagainya. *Input* dapat dinyatakan secara kuantitatif (jumlah guru, luas tanah, jumlah guru dsb), *input* dapat pula dinyatakan dengan nilai uang (biaya dokter, harga tanah, gaji guru dsb).

b) Keluaran (*output*)

Merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Harus diingat pula *output* yang diinginkan, dan *output* lainnya yang tidak diinginkan merupakan efek samping. Mengukur *output* (kualitatif) lebih sulit dilakukan pada pelayanan sosial, pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Pengukuran kualitatif dapat dilakukan berupa kenaikan nilai, atau nilai tambah seperti peningkatan kualitas hidup

c) Sasaran Utama (*throughput*)

Analisis *value for money* memerlukan data masukan dan *output* yang memadai. Masalahnya adalah tidak tersedianya data

output yang lengkap, sehingga sulit mengukur data *output* dan perlu digunakan *output* antara (*intermediate output*) atau indikator kinerja (*performance indicator*), misalnya perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan harapan hidup.

d) Pencapaian Hasil (*outcome*)

Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Sebagai contoh, *outcome* yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh dinas kebersihan kota adalah terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat. *Outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang hendak dicapai. *Value for money* merupakan sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari *input*, *output*, dan *outcome*.

Kegagalan organisasi sektor publik untuk mendapatkan *input* pada harga yang semestinya menyebabkan tidak terpenuhinya indikator ekonomi. Selanjutnya, *input* yang terlalu mahal akan mengakibatkan inefisiensi yang pada akhirnya akan mengarah pada tidak efektifnya pencapaian program secara keseluruhan. Nordiawan (2018) menjelaskan bahwa *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* tujuan pengukuran *value for money* yaitu mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam

penggunaan sumber daya dan hasil maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. (Mardiasmo, 2018)

3. Akuntabilitas Publik

a. Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang berhak serta memiliki kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban dari pihak pemegang amanah.

Untuk itu suatu akuntabilitas tidaklah abstrak tapi konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang spesifik mengenai masalah apa saja yang perlu untuk dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa baik prosedur hukum yang telah diikuti untuk membentuk suatu keputusan administratif publik yang harus dihormati oleh pegawai sipil dan otoritas publik.

b. Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang Amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi Amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk

meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu :

- 1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.
- 2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

c. Dimensi Akuntabilitas

Mardiasmo (2019:21) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)
- 2) Akuntabilitas Proses (*Process accountability*)
- 3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
- 4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*).

Menurut Ellwood (2015) dalam Mardiasmo (2018) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

- 1) Akuntabilitass Kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan Akuntabilitas Hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- 2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*) akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPRDPRD dan masyarakat luas.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa ahli. Hasil-hasil yang ditemukan oleh peneliti tersebut dapat digunakan sebagai referensi di dalam penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	A.B.Setiawan,W. Agustina (2018)	Analisis <i>Value For Money</i> Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor)	Metode Penelitian <i>Purposive Sampling</i>	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa harga saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread. Sedangkan frekuensi perdagangan saham berpengaruh terhadap bid-ask spread.
2	Anita Daun Lamba (2020)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan <i>Value For Money</i> Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kantor BPKAD Kota Palopo)	Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan <i>value for money</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3	Felmi D.Lantowa, Fariani	Pengaruh Penerapan dimensi <i>Value</i>	Metode pengambilan sampel acak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kondisi penerapan

	Machmud (2020)	For Money terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango)	sederhana	<p>dimensi <i>value for money</i> pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik atau termasuk dalam kategori sedang.</p> <p>2. Kondisi akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik atau termasuk dalam kategori sedang.</p> <p>3. Pengaruh penerapan dimensi <i>value for money</i> yang terdiri dari dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik secara keseluruhan, tapi secara masing-masing dari tiga dimensi <i>value for money</i> yang diamati hanya variabel ekonomis dan variabel efisiensi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, sedangkan variabel efektivitas walaupun mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas publik namun pengaruhnya tidak signifikan</p> <p>4. Hasil analisis determinasi menunjukkan variabel dependen (akuntabilitas publik) mampu dijelaskan oleh variabel independen (<i>value for money</i>).</p>
4	Esa Putera Perdana (2019)	Pengaruh Efektivitas Sistem	Metode Penelitian <i>Purposive</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas sistem

		Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja <i>Value For Money</i> Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pendapatan Daerah, Dan Inspektorat di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi)	<i>Sampling</i>	pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5	Julie Abdullah (2018)	Pengaruh Penerapan Dimensi <i>Value For Money</i> Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato	Metode Penelitian Regresi berganda	<p>1. Bahwa adanya positif tersebut berarti semakin tinggi ekonomis, maka akuntabilitas publik akan semakin baik.</p> <p>2. Bahwa adanya positif tersebut berarti semakin baik efisiensi, maka akuntabilitas publik akan semakin meningkat.</p> <p>3. Bahwa adanya positif tersebut berarti semakin tinggi efektivitas, maka akuntabilitas publik akan semakin baik.</p>
6	Anesa Pramudita (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Value For Money</i> , dan Sistem	Meode Penelitian Deskriptif Kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <p>1. Variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>

		Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo)		<p>2. Variabel <i>Value for money</i> tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>3. Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>4. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah, <i>value for money</i> dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
7	Benny Agus Trilaksono (2020)	Analisis <i>Value For Money</i> dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Pelayanan Publik.	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penilaian Akuntabilitas yang diukur dengan LKJIP dan Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menjalankan kinerjanya dengan Akuntabel. Dan penilaian dari pelayanan publik yang dikeluarkan telah memenuhi kebutuhan pengguna layanan publik.
8	Hesti Ibrahim (2017)	Pengaruh <i>Value For Money</i> dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo	Metode Penelitian Deskriptif kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa : Secara parsial <i>value for money</i> berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik, Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik. Secara simultan <i>value for money</i> dan sistem pengendalian intern

				berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik	positif terhadap
--	--	--	--	--	------------------

Para peneliti sebelumnya menyatakan hasil yaitu dari penelitian Setiawan & Agustina (2018) menunjukkan bahwa harga saham tidak berpengaruh terhadap *bid-ask spread* sedangkan *frekuensi* perdagangan saham berpengaruh terhadap *bid-ask spread*. Hal tersebut didukung oleh penelitian Felmi D. Lantowa (2020) bahwa salah satu variabel yang diteliti yaitu variabel efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan walaupun mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas publik. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Daun Lamba (2020), Esa Putera Perdana (2019), Julie Abdullah (2018), Anesa Pramudita (2017), dan Benny Agus Trilaksono (2020) yang menyatakan bahwa hasil penelitian mereka secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Begitupun dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menyatakan bahwa secara keseluruhan dari variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

C. Kerangka Konsep

Menurut Singarimbun (2018) mengatakan bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan sebagai fenomena yang sama.

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak yang berkepentingan demi pemenuhan hak-hak publik. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, kebocoran dana, dan institut yang merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas maka dapat dilihat dalam kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

D. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan empiris hasil penelitian sebelumnya di atas maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dimensi ekonomi dalam konsep *value for Money* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

Kewenangan atas pendanaan yang diserahkan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat-Daerah dan antar Daerah. Implikasi langsung pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan keuangan antara Pusat-Daerah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat dengan menerapkan dimensi ekonomis dalam penggunaan dan pengelolaan sumber dana. (Effendy, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2018), menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan konsep *value for money* dilihat dari dimensi ekonomi terhadap akuntabilitas publik.

Berdasarkan penjelasan teori studi empiris terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yaitu :

H1 : Dimensi Ekonomi dalam Konsep Value For Money Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

2) Dimensi efisiensi dalam konsep *value for Money* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

Agus (2017) menjelaskan bahwa efisiensi atau daya guna adalah bagaimana bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Jadi efisiensi ini diukur dari rasio *output* dan *cost*. Pengelolaan keuangan dan sumber daya organisasi dengan menerapkan prinsip efisiensi dapat menyelenggarakan dan meningkatkan pencapaian akuntabilitas organisasi baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2018) menemukan bahwa dimensi efisiensi berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas publik

Berdasarkan penjelasan teori studi empiris terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yaitu

H2 : Dimensi Efisiensi dalam Konsep Value For Money Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

3) Dimensi efektivitas dalam konsep *value for Money* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

Mahmud (2019) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Penelitian yang dilakukan oleh Abdulan (2018) menemukan bahwa dimensi efektivitas berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas publik.

Berdasarkan penjelasan teori studi empiris terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yaitu

H3 : *Dimensi Efektivitas Dalam Konsep Value For Money Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *eksplanatory research*, dimana penelitian ini bermaksud melihat hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang terjadi antara variabel *independen* dengan variabel *dependen*. Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivism* digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random*, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan desa kecamatan bajeng kabupaten Gowa. Secara keseluruhan penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran

Menurut (Sugiyono, 2017) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan hubungan antara satu variable dengan variable lainnya dalam penelitian ini terdiri dari variable bebas (*Independent variable*) dan Variabel terikat (*Dependent Variabel*). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Pengukuran Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator/Pengukuran	Keterangan
Ekonomi	Merupakan cara bagaimana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran untuk kepentingan publik 2. Anggaran dikelola ekonomis 	Al Hakim dan Harnovinsah (2019)
Efisiensi	Merupakan cara untuk menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran dikelola efisien 2. Anggaran digunakan efisien, hemat 3. Anggaran berprinsip 3E 4. VFM mencapai Good Governance 	Al Hakim dan Harnovinsah (2019)
Efektivitas	Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. anggaran dikelola efektif 2. anggaran dikelola adil dan merata 3. anggaran tidak terkonsentrasi kelompok 4. ada peran pemerintah 5. belanja untuk kepentingan publik 	Al Hakim dan Harnovinsah (2019)
Akuntabilitas	Merupakan kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelibatan unsur masyarakat 2. anggaran disajikan terbuka, cepat, tepat 3. kepentingan publik perhatian utama 4. Rakyat perlu tahu dokumen anggaran 5. Evaluasi anggarandenagn indikator kinerja 6. Proses anggaran diawasi terus-menerus 7. Penyertaan informasi masa lalu 8. Evaluasi anggaran membandingkan realisasi 9. Pertanggungjawaban vertikal dan horizontal 	Al Hakim dan Harnovinsah (2019)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, (Sugiyono, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur yang ada di Pemerintahan desa kecamatan bajeng kabupaten gowa. Adapun jumlah populasi tersebut adalah sebanyak 60 orang dari 14 desa yang ada di Kecamatan Bajeng.

2. Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2018) Teknik ini untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative

Dan seluruh populasi yang ada di Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa maka yang terpilih menjadi sampel penelitian yaitu keseluruhan dari populasi tersebut yaitu sebanyak 60 pegawai/responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Angket merupakan teknik

pengumpulan data yang dijawab dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2018).

F. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistic deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Semua pengujian pada penelitian ini menggunakan software SPSS.

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan nilai minimum, maksimal, mean, dan deviasi standar dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini

b. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas.

1) Uji normalitas

Menurut (Ghozali, 2017) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk melihat model regresi normal atau tidak maka dilakukan uji *One sample Kolmogrov-Smirnov* adalah lebih dari 0,5 maka H_0 diterima, sehingga data residual tidak berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai signifikan *Kolmogrov-Smirnov* adalah lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga data residual berdistribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas juga dapat dilihat dalam *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data dapat

dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk membuktikan ada tidaknya heteroskedastisitas.

a. Uji Regresi Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana yaitu metode statistik untuk menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model persamaan yang diperoleh dari regresi sederhana adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas Publik

α = konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Angka arah koefisien regresi

X1 = Value For Money dimensi Ekonomi

X2 = Value For Money dimensi Efisiensi

X3 = Value For Money dimensi Eefektifitas

e = Standar error

3) Uji Parsial (t)

Uji Hipotesis dilakukan melalui uji t dengan cara membandingkan antara t hitung dengan t tabel dari koefisien regresi tiap variabel independen. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari tiap variabel independen memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikan (Sig.) T yang dibandingkan dengan batas signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka secara parsial masing-masing variabel terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

4) Uji Determinasi (R Square atau R^2)

Menurut (Ghozali, 2017) Untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square). Koefisien determinasi atau biasa disimbolkan dengan (R^2) yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel *independen* (X) terhadap variabel terikat atau variabel *Dependent* (Y), atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R Square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Bajeng

Pada sekitar awal abad 12 M di Bantaeng diawali dengan datangnya para pedagang dari Gujarat, India. Mereka berasal dari negara bagian timur yaitu tanah Arab, Pakistan, dan Turki yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan juga beberapa pasangan suami dan istri. Salah satu rombongan tersebut bernama Syekh Abdurrahman Dihan yang juga merupakan pemimpin dari rombongan tersebut yang dimana menurut riwayat beliau adalah keturunan dari Syaidina Ali Ra yang melakukan perjalanan dari tanah Arab kemudian datang ke Turki menuju ke India lalu ke Aceh dan singgah di Johor Semenanjung Melayu yang sampai akhirnya tiba di Bantaeng. Tujuan beliau melakukan perjalanan tersebut yakni untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam pada penduduk setempat. Dalam hal inilah akhirnya beliau saling mengenal dan berhubungan baik dengan penduduk setempat yang akhirnya terjalin hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dari mereka.

Tidak berselang lama datang juga dua bersaudara ditempat itu untuk membuka ladang dan bertanam yang sama dengan tanaman mereka. Dalam hubungan bertetangga akhirnya diketahui bahwa keduanya adalah Lakipadada dengan saudaranya Karaeng Bayo. Setelah beberapa musim, kedua orang ini pamit kepada Syekh

Abdurrahman Djohan untuk meneruskan perantaun mereka yang katanya untuk mencari tuhan, mereka berjalan menuju ke utara. Dikemudian hari diketahui bahwa salah seorang dari kedua orang yaitu karaeng Bayo merupakan adik laki-laki dari Lakipadada yang menikahi Tumanurung di Gowa dan menjadi raja pertama di Gowa.

Dari hubungan kekerabatan ini Syekh Abdurrahman Djohan diberi nama I Baso Dg Pabeta nama ini diberikan atas permintaan beliau sendiri. Beliau menanyakan nama apa yang bagus untuk seorang laki-laki di Bantaeng maka dijawablah "I Baso" dan jika selalu menang dikatakan pula "Pabeta-beta". Mendengar jawaban tersebut, maka beliau meminta supaya ia dipanggil saja dengan nama I Baso Dg Pabeta yang artinya yaitu laki-laki tidak terkalahkan.

★ Tidak ada yang tau berapa lama I Baso Dg Pabeta berada di Bantaeng karena menurut riwayat setelah beberapa lama ia bermaksud untuk meninggalkan Bantaeng untuk melanjutkan perjalanan untuk mengembangkan dan menyebarkan agama islam ditarah Makassar. Bersama sebagian keluarga dan pengikutnya I Baso Dg Pabeta berangkat untuk meninggalkan Bantaeng menuju kearah barat melewati daerah-daerah Arungkeke, Binamu, Bangkala, Laiang, Sanrobone, yang sampai akhirnya tiba di daerah Sompu atau Talaka/Salaka. Disana beliau merasa betah dan cocok untuk bermukim, keingonan tersebut disambut baik oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat daerah tersebut. Sembilan penguasa yang merupakan pimpinan daerah tersebut antara lain yaitu : Gallarrang Ribajeng, Gallarrang Maloto, Gallarrang Moncongkomba, Gallarrang Pangkaje'ne, Gallarrang

Balla'borong, dan Gallarrang Je'nemaeja, sepakat untuk mengangkat seorang raja sebagai pemimpin dan menyatukan mereka dalam kerajaan besar.

Berdasarkan kesepakatan sembilan Gallarrang tersebut I Baso Dg Pabeta di angkat menjadi Raja Bajeng pertama dengan gelar Karaeng Loe Ri Bajeng. Sebagai raja dan pemegang kekuasaan Karaeng Loe memiliki senjata pusaka yang bernama *Poke Tamannyalaya* yang artinya yaitu tombak yang tidak pernah meleset dari sasaran. Kerajaan Bajeng pun mempunyai bendera kerajaan yang berwarna merah dengan ornamen warna putih yang bergelar *jole-jolea* yang berasal dari bahasa arab yaitu *Zulzilah* yang mempunyai arti yaitu menggoncangkan tetapi dalam keseharian diucapkan dengan lidah dan dialek Makassar akhirnya disebut *jole-jolea*, bendera tersebut dibuat atas permintaan dari raja Bajeng pertama.

Kerajaan Bajeng yang terletak dibagian selatan Jazirah Sulawesi Selatan yang sekarang adalah Kabupaten Takalar dan Sebagian Kabupaten Gowa berkembang dengan pesat menjadi kerajaan yang kuat dengan batas wilayah kekuasaan yang meliputi : Sebelah utara Binanga Taeng /Binanga Je'ne Berang, sebelah timur Bulu Bawakaraeng, kemudian sebelah selatan Turatea dan terakhir sebelah barat Tamparang. Raja-raja dan penguasa yang ada dalam batas-batas tersebut bergabung dengan kerajaan Bajeng antara lain yaitu seperti Arungkeke, Binamu, Bangkala dan Laikang.

Disisi lain pihak kerajaan Gowa dibagian utara sudah melakukan ekspansi dan usaha perluasan kekuasaan dengan memerangi kerajaan-

kerajaan kecil di Sulawesi tetapi dengan kerajaan besar dan kuat seperti kerajaan Manuru, Bone, Luwu, Bajeng diadakan perjanjian persahabatan.

Perdamaian kerajaan Bajeng dengan kerajaan Gowa berjalan dengan cukup lama yang hingga akhirnya raja Gowa berkeinginan menjalin hubungan kekeluargaan dengan kerajaan Bajeng maka diutuslah seorang kepercayaan untuk meminang anak perempuan raja Bajeng untuk dijadikan permaisuri putera raja Gowa tetapi pinangan raja Gowa tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa Raja Bajeng tidak seagama dengan raja Gowa yang dimana raja Bajeng memeluk agama islam sedangkan raja Gowa belum memeluk agama islam dan raja Bajeng merasa lebih kuat dan sempurna karena payung kerajaan Bajeng adalah satu lingkaran penuh bundar, sedangkan payung kerajaan Gowa adalah setengah lingkaran (*ta'lang sipue*). Dengan pertimbangan tersebut maka disampaikanlah kepada utusan raja Gowa untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Raja Gowa bahwa Gowa tak layak ke Bajeng dan Bajeng pun tidak layak ke Gowa.

Maka pulanglah seorang utusan tersebut untuk menyampaikan jawaban dari Raja Bajeng kepada Raja Gowa bahwa keinginan Raja Gowa untuk meminang puteri Raja Bajeng ditolak, mendengar jawaban dari Raja Bajeng tersebut Raja Gowa kembali memintah utusannya tersebut untuk kembali ke Bajeng untuk menyampaikan sekali lagi keinginan Raja Gowa dan apabila pinangan Raja Gowa ditolak lagi maka akan terjadi peperangan antara kerajaan Bajeng dan Kerajaan Gowa. Menurut riwayat bahwa pada saat itu sebagai jawaban, panglima

perang Tubajeng meotong telinga kanan utusan itu dan menyuruhnya kembali ke Gowa. Perlakuan tersebut hingga membangkitkan kemarahan Raja Gowa yang akhirnya menyerang kerajaan Bajeng yang dimana pada saat itu pasukan kerajaan Gowa dipimpin oleh panglima perang yang gagah dan berani yaitu Kare Kolo'ri Sero, akan tetapi pasukan kerajaan Bajeng terlalu kuat untuk dikalahkan yang pada saat itu pasukan kerajaan Bajeng dipimpin oleh dua orang Tu Barani sebagai panglima perang yaitu I Bangkasi Caddi-caddi dengan I Tanrasasang Bodo-bodo.

Perang tersebut berlangsung selama beberapa tahun, dan sudah banyak cara dilakukan kerajaan Gowa untuk menghancurkan kerajaan Bajeng seperti menyusupkan orang kepercayaan untuk berpura-pura menjadi buronan kerajaan Gowa yang mencari suaka kerajaan Bajeng namun hal tersebut belum berhasil untuk menghancurkan kerajaan Bajeng, hingga yang pada akhirnya kerajaan Gowa mengetahui sumber kekuatan dari Raja Bajeng yaitu senjata sakti dan ampuh yang bergelar I Bu'le yang menurut informasi bahwa kerajaan bajeng hanya dapat dikalahkan jika I Bu'le dapat direbut. Sampai pada suatu hari Raja Gowa meminta bantuan Raja Galesong untuk mengambil senjata I Bu'le dari kerajaan Bajeng karena Raja Gowa mengetahui bahwa Raja Galesong sangat akrab dengan Raja Bajeng tersebut dan rencana tersebut di setujui oleh Raja Galesong dengan imbalan yang besar.

Dikabarkan bahwa Raja Galesong diundang untuk menghadiri pesta oleh Raja Bajeng, yang kemudian hal tersebut dijadikan kesempatan oleh Raja Galesong untuk mendapatkan benda tersebut,

maka Raja Galesong dengan segera memerintahkan rakyatnya untuk mengumpulkan jerami dan daun lontar serta kotoran kerbau yang kemudian di tumpukkan disekitar kampung kanang. Raja Galesong memrintahkan untuk membakar kumpulan jerami kering dan daun lontar tersebut dibakar setelah matahari terbenam setelah pesta di Bajeng berlangsung. Sampai tibalah malam hari pada saat berlangsungnya pesta, jerami-jerami tersebut dibakar yang menimbulkan cahaya yang berwarna merah yang seolah-olah menandakan bahwa kerajaan Galesong sedang diserang oleh kerajaan Gowa.

Melihat hal tersebut Raja Bajeng menyuruh pasukan untuk memberikan bantuan namun Raja Galesong hanya meminta satu benda sakti dari kerajaan Bajeng yaitu I Bu'le, tanpa berpikir panjang dan curiga I Bu'le diserahkan ke Raja Galesong yang kemudian Raja Galesong bergegas ke Gowa untuk memberikan senjata tersebut ke Raja Gowa. Raja Bajeng baru menyadari bahwa dirinya tertipu setelah I Bu'le tiba dipangkuannya, Raja Bajeng mengetahui bahwa I Bu'le telah dipergunakan orang untuk mencelakai dirinya. Merasa kecewa dan dikhianati oleh teman baiknya kemudian Raja membenkan pesan kepada seluruh anak cucunya dan keturunannya bahwa jangan ada yang bersahabat atau sampai menikah dengan keturunan dari Raja Galesong.

Setelah kejadian tersebut muncullah dalam pikiran Raja Bajeng bahwa dengan perang hanya akan memakan banyak korban, kedua kerajaan tidak mungkin akan bersatu mereka hanya akan menjadi korban yang sia-sia, oleh karena itu Raja Bajeng memilih untuk

meletakkan jabatan dan menyerahkan kepada I Manrottokang Dg Marewa selaku pelaksana tugas (I Towa Ri Bajeng). Selanjutnya I Manrottokang Marewa yang menunjuk dan mengangkat Mappatunru sebagai Raja Bajeng sekaligus pemegang kekuasaan sedangkan pemegang *panji-panji* kerajaan (*kalompoang*) yaitu Manrottokang Dg Marewa bergelar I Towa Ri Bajeng.

Sampai saat ini yang diketahui bahwa kerajaan Bajeng pernah dipimpin oleh 6 (enam) orang raja, yaitu :

1. I Baso Dg. Pabeta Karaeng Loe Ri Bajeng
2. I Mappatunru
3. I Makkulau dg. Pabundu Karaeng Bajeng
4. I Hanafi dg. Paturu Kare Bajeng
5. I Kadere Kare Manruppai
6. I Salemang Karaeng Ngitung Kare Bajeng

Setelah puluhan tahun tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1945 seorang perwira Jepang yang bernama Fukusima datang bersama salah seorang putra Limbung yang bekerja sebagai pegawai Pelabuhan sekaligus juru bicara, kedatangan Fukusima ke Balla Lompoa Limbung Bajeng untuk mencari sesuatu yang bisa membuat rakyat Sulawesi untuk melawan penjajah, sebelumnya Fukusima telah berkeliling kebeberapa wilayah di Sulawesi di Luwu, Bone, Wajo, dan sampai di Gowa mereka belum menemukan yang ia cari, maka pada saat singgah di Gowa beliau meminta petunjuk kepada orang-orang Gowa, dimana lagi ada bekas kerajaan besar atau Gaukang yang masih terpelihara,

beliau diberitahu bahwa di Balla Lompoa Bajeng masih ada Gaukang kerajaan Bajeng yang masih disimpan dan dirawat oleh para ahli waris kerajaan Bajeng yang mungkin itulah yang tuan cari, dari petunjuk itulah yang membawa Fukushima ke Limbung-Bajeng.

Fukusima ingin melihat dan menyaksikan benda-benda bersejarah tersebut yang waktu itu Batang Banoa menjadi penanggung jawab dari benda-benda tersebut dan benda-benda tersebut hanya dapat dibuka bila disaksikan dan dihadiri oleh Batang Banoa Appaka beserta para tokoh dan pemuka masyarakat Tu Bajeng, maka pada hari sabtu, 11 Agustus 1945 setelah keempat Batang Banoa hadir di Balla Lompoa Limbung yang masing-masing adalah Batang Banoa Limbung (Maitulolo dg Rurung) Batang Banoa Mataalo (Nuhung dg Bani), Batang Banoa Ballo (Neko dg Ngago) dan Batang Banoa Pammase (Pakai dg Suang), disertai dengan para pemuka dan tokoh masyarakat keluarga besar Tu Bajeng serta seluruh warga Bajeng Fukushima mencantakan bahwa sekarang Jepang sudah kalah, karena kedua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki telah dihancurkan oleh tentara sekutu dengan bom atom yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Jepang.

Menurut Fukusima inilah kesempatan yang paling baik untuk melepaskan diri dari penjajah mereka yaitu Belanda. Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh semua yang hadir pada saat itu, menurut tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing. Setelah diadakan pembicaraan dan beberapa pertimbangan akhirnya disepakatilah bahwa Gaukang Tu Bajeng akan dibuka pada hari selasa

tanggal 14 Agustus 1945 dihadapan keluarga besar Tubajeng dan akan dilaksanakan acara yang sesuai dengan amanat dan pesan nenek moyang secara turun-temurun.

Berita pembukaan Gaukang Tu Bajeng segera tersebar luas hanya dalam waktu dua hari, dan akhirnya pada hari dan tanggal yang telah disepakati berlangsungnya pembukaan Gaukang Tu Bajeng yang belum pernah dilihat oleh generasi saat itu, sebelumnya Gaukang tersebut terakhir dibuka pada perang 1905 di Bungung Barania waktu perang dengan Belanda. Dengan khidmat dibukalah sebuah peti kayu yang berisi sebuah bendera persegi empat berwarna merah dengan ornamen berwarna putih yang menurut pesan bendera tersebut adalah bendera kerajaan yang bergelar *jole-jolea* serta sebuah bendera berwarna merah polos segiempat panjang.

Setelah bendera dikibarkan yang berarti Tu Bajeng dalam keadaan siap perang, maka untuk memenuhi pesan dari leluhur bahwa sebelum pergi berperang mereka berkumpul di Bungung Barania untuk *a'dinging-dinging*, maka pada hari selasa 14 Agustus 1945 sekitar jam 09 pagi bendera Tu Bajeng dan bendera merah putih diarak oleh puluhan ribu rakyat yang datang dari berbagai pelosok dengan diapit oleh para Tu Barania beserta seluruh anggota perang dan Gaukang Tu Bajeng yang dibawa oleh petugas-petugas tertentu menuju ke Bungung Barania di Mataallo, selama tiga hari tiga malam *a'dinging-dinging* di Bungung Barania masyarakat diisi dengan berbagai kegiatan seperti beladiri maupun pertunjukan kesenian tradisional daerah Bajeng.

Sampai pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 dalam persiapan untuk Kembali ke Balla Lompoa Limbung, didengar berita melalui radio dari tuan Razak bahwa kemerdekaan Indonesia telah di proklamirkan di jl pegangsaan timur No.56 Jakarta oleh Soekarno-Hatta pada jam 10.00 pagi maka kembalilah untuk yang kedua kalinya dikibarkan bendera merah putih dengan upacara sederhana di Panranga Mataallo kurang lebih satu kilometer disebelah selatan Bungung Barania pada hari itu pula tanggal 17 Agustus 1945 di Bungung Barania dibentuk suatu organisasi pemuda bernama Gerakan Pemuda Bajeng yang diketuai oleh Nuhung dg Bani Batang Banoa Mataallo, merupakan organisasi pertama yang dibentuk untuk melawan penjajah.

Namun setelah beberapa tahun kemudian berdasarkan undang-undang No.1 th.1957 tentang penataan Kembali sistem pemerintahan di Indonesia hingga tahun 1891, distrik-distrik yang lama tergabung dalam adat dilebur dan diubah menjadi kecamatan hingga pada tahun 1963 distrik Limbung dibagi menjadi dua wilayah pemerintahan dengan mengembalikn nama Bajeng dalam bentuk kecamatan yaitu Kecamatan Bajeng dan Kecamatan Pallangga.

2. Keadaan Geografis

a. Letak dan Batas Wilayah

Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten Gowa yang terletak di sebelah Utara Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten Gowa. Dari

segi geografis Kecamatan Bajeng terdiri dari dataran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palangga
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Takalar
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Barat

Koordinat dan ketinggian letak kantor Desa/Kelurahan, desa yang paling jauh dari permukaan laut adalah Desa Bone sedangkan Desa yang paling dekat dengan laut adalah Desa Maccini Baji. Untuk lebih jelasnya ketinggian dari permukaan laut masing-masing desa.

b. Luas Wilayah

Kecamatan Bajeng merupakan wilayah dataran yang memiliki wilayah seluas 60,09 Km² atau 3,19% dari luas wilayah dataran Kabupaten Gowa. Kecamatan Bajeng mempunyai 14 wilayah Desa/Kelurahan yaitu dengan desa yang terluas adalah Desa Pabentengang dengan luas wilayah 8,89 Km² atau 14,79% dari luas Kecamatan Bajeng. Untuk desa yang terkecil adalah Kelurahan Mataallo dengan luas wilayah 2,5 Km² atau 1,22% dari Luas Kecamatan Bajeng. Akses dari Ibukota kecamatan keseluruhan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Bajeng relatif mudah, karena semua Desa/Kelurahan dapat dilewati dengan kendaraan roda empat maupun roda dua.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu topik yang terkait dengan pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan,

penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi sebagai juga sasaran pemabangunan. Untuk meningkatkan kesejahteraan, perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengendalian kualitas, serta pengarah mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan. Pada tahun 2018 perkembangan penduduk di Kecamatan Bajeng terus meningkat. Hal utama yang mempengaruhi perkembangan penduduk di Kecamatan Bajeng yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Penduduk terbanyak di Kecamatan Bajeng berada di Desa Pandiro sebanyak 6.885 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk pada kelurahan Mataallo terbesar sebanyak 3.137 jiwa perkiometer persegi. Berdasarkan data jumlah rumah tangga pada tahun 2018 mencapai 16.541 rumah tangga, dengan rata-rata anggota setiap rumah tangga sebanyak 4 orang.

Peningkatan jumlah rumah tersebut selain disebabkan oleh adanya perubahan status perkawinan penduduk, hal lain juga disebabkan oleh adanya tambahan penduduk melalui migrasi antar daerah/provinsi. Selama tahun 2018 penduduk berjenis kelamin perempuan mencapai 34.785 jiwa dan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34.041 jiwa. Sex Rasio pada jenis kelamin tahun 2018 adalah 98. Dengan Rasio terbesar berada di Desa Lempangang sebesar 101, Bontosunggu dan Tubajeng sebesar 100. Sedanggkn yang terkecil berada di Kelurahan Limbung sebesar 93. Persebaran penduduk yang ada di Kecamatan Bajeng dengan jumlah penduduk

sebanyak 68.826 jiwa, penduduk terbanyak berada di Desa Panciro sebanyak 6.895 jiwa, sedangkan pada jumlah penduduk terkecil berada di Kelurahan Tubajeng yang hanya 2.992 jiwa.

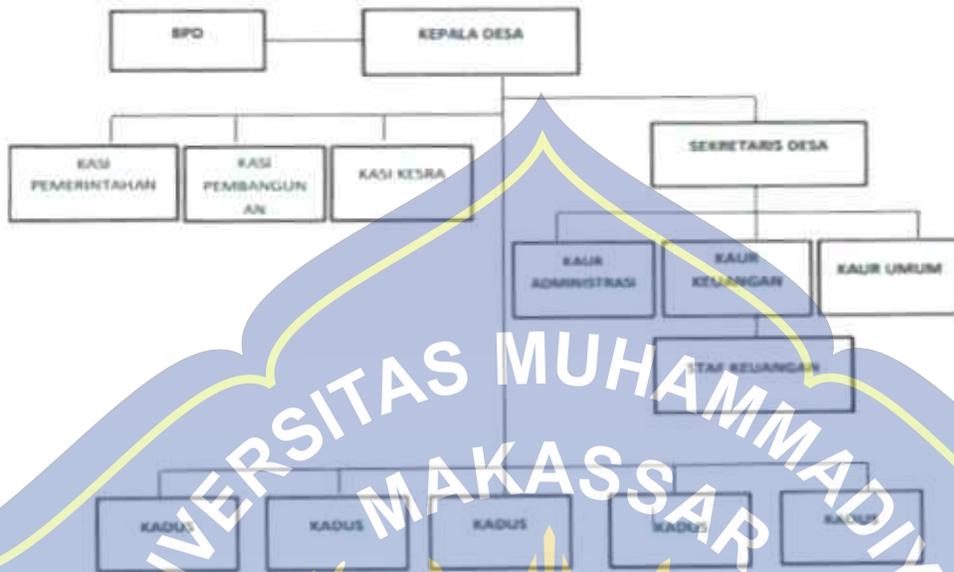
4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan juga akan bermakna strategis karena dapat dipakai sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menumbuhkan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir.

Pemerintah telah berusaha memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan, diantaranya dengan memberikan bantuan dan sekolah gratis. Setiap tahun persentase penduduk yang memasuki bangku sekolah terus bertambah, keadaan ini merupakan bentuk semakin sadarnya masyarakat di Kecamatan Bajeng akan arti pentingnya pendidikan.

Pada tahun 2018 di Kecamatan Bajeng sarana pendidikan prasekolah (TK) sebanyak 26 sekolah, kemudian untuk pendidikan sekolah dasar (SDN,SDI,MI) sebanyak 43 sekolah, untuk SLTP Negeri,Swasta,MTs terdiri dari 13 sekolah dan SMA,SMK Negeri, Swasta, MA sebanyak 12 sekolah yang tersebar di beberapa Desa/Kelurahan.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Gambar 4.1
Pemerintahan Desa

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa :

- Menjalankan roda pemerintahan dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa)
- Mengajukan Suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa
- Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD
- Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD
- Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Desa

- a. Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala desa berjalan dengan baik
- b. Membantu kepala desa apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya
- c. Apabila kepala desa diberhentikan maka sekretaris desa yang ambil sementara tugasnya
- d. Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa
- e. Melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh kepala desa

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Urusan Umum

- a. Mengendalikan kearsipan dan surat masuk serta surat keluar
- b. Mencatat inventaris atau kekayaan desa
- c. Melakukan administrasi umum
- d. Menyimpan, menyediakan dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggungjawab dalam perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan kantor
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa
- f. Menyiapkan bahan dalam pembuatan laporan

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Urusan Keuangan

- a. Mengelola administrasi keuangan desa
- b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun APB desa
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Urusan Pemerintahan

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan
- b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan dan keputusan
- c. Melaksanakan administrasi pertahanan
- d. Mencatat monografi desa
- e. Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk membantu memperlancar penyelenggaraan kegiatan desa

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Urusan Pembangunan

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa
- b. Mempersiapkan bantuan untuk kajian perkembangan ekonomi warga masyarakat
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

- a. Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program keagamaan
- b. Mempersiapkan bahan yang dipakai dalam program pemberdayaan masyarakat desa
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan diperintah oleh kepala desa

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Dusun

- a. Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa
- b. Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat

- c. Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW dalam wilayah kerjanya
- d. Melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh kepala desa

Tugas dan Tanggung Jawab BPD (Badan Perwakilan Desa)

- a. Membahas tentang rancangan atau rencana peraturan desa yang dibuat bersama
- b. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa bekerjasama dengan sekretaris desa
- c. Memberikan usulan tentang pengangkatan atau pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia dalam rangka pemilihan kepala desa
- e. Menampung, mengumpulkan atau menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
- g. Menjaga kehidupan Demokrasi

B. Hasil Penelitian

1. Sebaran data Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 60 kuesioner kepada kepala Desa, bendahara desa dan staf desa. Dari 14 Desa yang disebarkan, semuanya kembali dan kuesioner yang dapat diolah semuanya. Adapun tabel sebaran data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Sebaran Data Penelitian

No	Kuesioner	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	60	100,00%
2	Kuesioner yang kembali	60	100,00%
3	Kuesioner yang rusak/tidak kembali	0	
Jumlah Kuesioner yang diolah		60	100,00%

Sumber : data primer yang diolah, 2021

2. Deskripsi Responden

a. Karakteristik Responden

Data deskriptif ini menggambarkan berbagai kondisi responden yang ditampilkan secara statistik dan memberikan informasi secara sederhana keadaan responden yang dijadikan objek penelitian. Pada penelitian ini responden digambarkan berdasarkan jenis kelamin responden, Umur responden, pendidikan responden, dan masa kerja responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4. 2

Deskripsi Karakteristik Responden

Keterangan	Deskripsi	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	47	78,33%
	Wanita	13	21,67%
Umur Responden	25 Tahun	2	3,33%
	26 – 35 Tahun	15	25,00%
	36 – 55 Tahun	43	71,67%
	Diatas 55 Tahun	0	0,00%
Pendidikan Terakhir	D3	6	10,00%
	S1	42	70,00%
	S2	12	20,00%
	S3	0	0,00%
	Lainnya	0	0,00%

Lama Bekerja	Kurang dari 1 tahun	3	5,00%
	antara 1 – 5 Tahun	22	36,67%
	antara 6 – 10 Tahun	32	53,33%
	Lebih dari 10 Tahun	3	5,00%

Sumber : data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil sebaran distribusi data responden, dimana mayoritas reponden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 47 orang atau 78,33% dari total sampel (Sekaligus yang menjabat sebagai kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara). Lebih lanjut tingkat pendidikan yang tinggi yaitu pada level Si sebanyak 42 orang atau 70% dengan pengalaman kerja yaitu 6-10 tahun sebanyak 32 orang atau 53,33%.

3. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas instrument dengan menggunakan *software statistic*, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$) maka instrument tersebut dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada $r\text{-hitung}$ lebih besar $r\text{-tabel}$ dimana nilai $r\text{-tabel}$ untuk sampel sebanyak 60 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Uji Validitas Variabel

Variabel	Indikator	Nilai	Nilai	Keterangan
		r_{hitung}	r_{tabel}	
Ekonomi X1	X1.1	0,320	0,195	Valid
	X1.2	0,494	0,195	Valid
	X1.3	0,436	0,195	Valid
Efisiensi X2	X2.1	0,458	0,195	Valid
	X2.2	0,481	0,195	Valid
	X2.3	0,474	0,195	Valid
Efektivitas X3	X3.1	0,560	0,195	Valid
	X3.2	0,589	0,195	Valid
	X3.3	0,396	0,195	Valid
Akuntabilitas Publik Y	Y1.1	0,640	0,195	Valid
	Y1.2	0,545	0,195	Valid
	Y1.3	0,742	0,195	Valid
	Y1.4	0,804	0,195	Valid
	Y1.5	0,676	0,195	Valid
	Y1.6	0,576	0,195	Valid
	Y1.7	0,625	0,195	Valid
	Y1.8	0,664	0,195	Valid

Sumber : Output SPSS 24.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2021

b. Uji Reliabilitas

Dari data berikut ini dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan *alpha cronbach's* lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrument tersebut reliabel. Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya.

Secara umum suatu instrument dikatakan bagus jika memiliki koefisien *cronbach's alpha* > 0,6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4 untuk sampel sebanyak 60 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Ekonomi(X1)	0,606	Reliabel
Efesiensi(X2)	0,656	Reliabel
Efektivitas (X3)	0,695	Reliabel
Akuntabilitas Publik (Y)	0,884	Reliabel

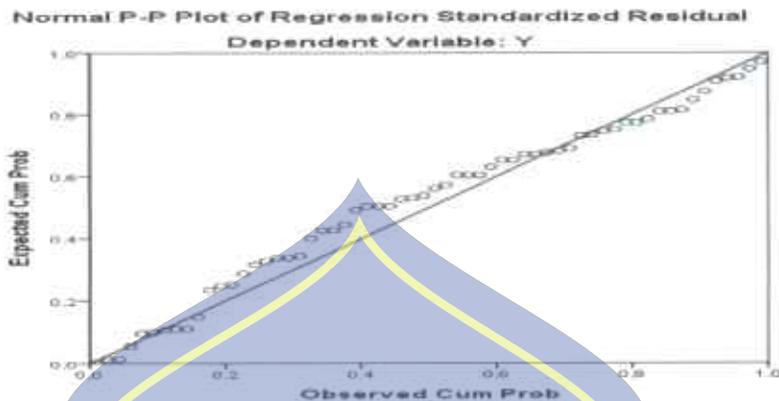
Sumber: Output SPSS 24.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2021

Tabel 4.4 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel Ekonomi sebesar 0,606, variabel Efesiensi sebesar 0,656, variabel Efesiensi sebesar 0,695 dan variabel Akuntabilitas Publik sebesar 0,884, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram *standardized residual* dan PP plot *standardized residual*. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu Ekonomi(X1), Efesiensi (X2) dan Efektivitas (X3) terhadap Akuntabilitas Publik (Y) semuanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini gambar grafik uji normalitas data pada grafik pp – plot.



Sumber : Output SPSS 24.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2021

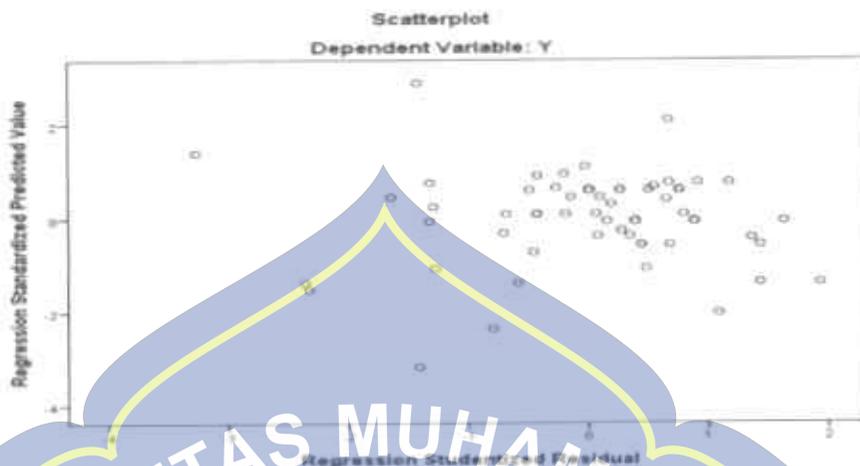
Gambar 4. 2

Hasil Uji Normalitas Data

Pada grafik normal plot terlihat titik - titik menyebar di sekitar Garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Output SPSS 24.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2021

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2017).

5. Analisis Pengujian Hipotesis
 - a. Analisis Regresi Berganda

Setelah dilakukan uji validitas dan reabilitas data dapat diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditunjukkan ring kasannya, seperti terlihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4. 5
Ringkasan hasil Estimasi Regresi

Variabel	Koefisien	Nilai	Probability	Keputusan
		t- hitung	Signifikan	
Ekonomi(X1)	-0,361	-1,309	0,198	Tidak Signifikan
Efisiensi(X2)	0,803	2,580	0,013	Signifikan
Efektivitas(X3)	0,135	0,721	0,474	Tidak Signifikan
Konstanta	1,598	2,390	0,020	Signifikan
R	0,508			
Adjusted R ²	0,218			
F-hitung	6,480			
(Prob- sign)	0,001			
DW	1,533			
N =	60			

Sumber: Output SPSS 24.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 24 for Windows, dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,598 - 0,361 + 0,803 + 0,135$$

b. Uji Koefisien Determinasi R² (Koefisien Determinasi)

Menurut Ghazali (2017) untuk menentukan seberapa besar variabel *independen* dapat menjelaskan variabel *dependen*, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data yang ada pada tabel 4.5 sehingga diperoleh nilai *Adjusted R Square* (R²) sebesar 0,218 atau 21,8%. Nilai *Adjusted R Square* (R²) ini nilai yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat *Adjusted R Square* (R²) dapat dikatakan bahwa variabel *dependen* yaitu Akuntabilitas Publik dapat dijelaskan oleh variabel *independen*

Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas sedangkan sisanya (100% - 21,8% = 78,2%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

c. Uji Simultan

Pengujian hipotesis secara simultan (serempak) dapat diuji dengan menggunakan uji ANOVA atau F test. Jika probabilitas nilai signifikansi $< 0,05$ maka hal ini menandakan H_1 diterima dan H_0 ditolak, dan apabila probabilitas nilai signifikansi $> 0,05$ maka hal ini menandakan H_1 ditolak dan H_0 diterima. Dimana koefesien dalam penelitian ini adalah 0,01. Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data seperti yang nampak pada tabel 4.5 diatas sehingga diperoleh nilai F-hitung 6,480 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan memprediksi Y (Akuntabilitas Publik) atau dapat dikatakan bahwa X_1 (Ekonomi), X_2 (Efisiensi) dan X_3 (Efektivitas) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y (Akuntabilitas Publik), hal ini menandakan H_1 diterima dan H_0 ditolak.

d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (penjelas) secara individual mampu menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Jika nilai t-hitung (+) $>$ (+) t-tabel atau t-hitung (-) $<$ (-) t-tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Dari hasil

program SPSS yang dilakukan mengestimasi data pada tabel 4.5 diatas sehingga diperoleh :

1. Variabel X1 (*Ekonomi*) memberikan nilai koefisien parameter (t-hitung) sebesar -1,309 dengan tingkat signifikansi 0,196 ($>0,05$). Hal ini berarti H_1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa *Ekonomi* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel *Ekonomi* $> 0,05$ ($0,196 > 0,05$) dan nilai t-hitung $> 1,669$ ($-1,309 < 1,669$).
2. Variabel X2 (*Efisiensi*) memberikan nilai koefisien parameter (t-hitung) sebesar 2,580 dengan tingkat signifikansi 0,013 ($<0,05$). Hal ini berarti H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa *Efisiensi* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel *Efisiensi* $< 0,05$ ($0,013 < 0,05$) dan nilai t-hitung $> 1,665$ ($2,590 > 1,665$).
3. Variabel X3 (*Efektivitas*) memberikan nilai koefisien parameter (t-hitung) sebesar 0,721 dengan tingkat signifikansi 0,474 ($>0,05$). Hal ini berarti H_1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa *Efektivitas* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel *Efektivitas* $> 0,05$ ($0,474 > 0,05$) dan nilai t-hitung $> 1,665$ ($0,114 < 1,665$).

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Publik yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep *Value For Money* dari Aspek Ekonomi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik

Ekonomi merupakan perolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan yang seharusnya. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu, Renyowijoyo, 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Ekonomi terhadap Akuntabilitas Publik, ini berarti didukung dengan adanya tanggapan responden yang menunjukkan bahwa rata-rata Kantor Desa yang ada di kecamatan Bajeng dalam menjalankan/melaksanakan kerja-kerja organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Value For Money*. Oleh karenanya Pada prinsip ekonomi di Kantor Desa yang ada di kecamatan Bajeng sudah baik hal tersebut dapat terlihat bahwa Kantor Desa yang ada di kecamatan Bajeng telah menerapkan biaya organisasi tidak melebihi

biaya yang telah dianggarkan dan direncanakan sebelumnya, sehingga dari segi ekonomi dikatakan telah tercapai dan memenuhi konsep dari prinsip-prinsip *value for money*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk melihat penggunaan *organisation cost* yang sesuai atau tidak bisa dilihat dan dapat dibandingkan dengan organisasi lain yang sejenis (*Prudency*). Tidak berpengaruhnya ekonomi terhadap akuntabilitas dikarenakan selama ini rata-rata kantor desa yang ada di kecamatan Bajeng telah melaksanakan program kerja sesuai dengan data dan dana yang telah dianggarkan sebelumnya sehingga tidak terdapat variance yang bisa mengganggu akuntabilitas Publik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sartika (2017) yang menyatakan bahwa Ekonomi berpengaruh negative terhadap Akuntabilitas Publik.

2. Konsep *Value For Money* dari Aspek Efisiensi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*), Renyowijoyo, 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara Konsep *Value for money* dalam aspek efisiensi terhadap Akuntabilitas Publik, artinya jika system dan prinsip *value for money* dijalankan dengan baik dari segi efisiensi maka akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat sebagai

pengguna dapat terpuaskan dan dapat menikmati pelayanan yang *excellent* dari kantor desa yang ada, sehingga keluhan bisa di minimalisir. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa pada prinsip efisiensi di Desa yang ada di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sudah baik hal tersebut dapat terlihat dari pemberian pelayanan publik secara cepat, responsif dan murah biaya, selain itu pelaksanaan tugas telah sesuai dengan prosedur dan etika dengan baik dalam hal kecakupan sistem informasi akuntansi sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi di kantor desa yang ada di kecamatan bajeng kabupaten gowa. Pada prinsip efisiensi di Desa yang ada di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sudah baik hal tersebut dapat terlihat dari program yang sedang berjalan sudah tepat dan memadai, sehingga memberikan hasil sesuai yang diharapkan selain itu program yang sedang berjalan saling melengkapi satu sama lain di Desa yang ada di Kecamatan Bajeng.

3. Konsep *Value For Money* dari Aspek Efektivitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program yang ditetapkan. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dari sebuah kegiatan/kebijakan yang dimana ukuran efektivitas merupakan *refleksi output*. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan, Renyowijoyo, 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tidak pengaruh secara parsial antara Konsep *Value for money* dalam aspek efektivitas terhadap akuntabilitas publik, artinya meski system dan prinsip *value for money* dari aspek efektivitas dijalankan hanya memberikan sedikit efek terhadap akuntabilitas publik, hal ini dikarenakan ada faktor lain juga yang ikut berkontribusi atas pelaksanaan akuntabilitas publik, yakni keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomis. Kesetaraan artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lantowa dan Mahmud (2020) yang menyatakan bahwa Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
JPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan di bab pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekonom tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik, hal ini dikarenakan dilihat dari nilai signifikan yang lebih dari nol koma lima
2. Efisiensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik, hal ini dikarenakan nilai signifikan kurang dari nol koma lima
3. Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik, hal ini dikarenakan dilihat dari nilai signifikan yang lebih dari nol koma lima.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian, berikut ini disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji variabel yang sama atau juga ditambahkan dengan variabel yang lain seperti konsep ketaraan dan keadilan.
2. Semua Pegawai yang ada di kantor Desa Kec. Bajeng kab. Gowa, khususnya yang menangani bagian keuangan sebaiknya memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam menggunakan dan mengelola sumber daya yang dipercayakan public, sehingga kepercayaan publik dapat meningkat dan keluhan dapat di minimalisir.
3. Perlu juga pelayanan yang baik dan merata kepada semua masyarakat, khususnya untuk pelayanan surat pengantar agar dilayani lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Julie. 2018. Pengaruh Penerapan Dimensi Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. *Gorontalo Accounting Journal* Vol 1 (1) 2018; 10-2.
- Al Hakim, Y., Harnovinsah. 2019. Penerapan Konsep Value For Money Dalam Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran. *Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Universitas Mercu Buana Jakarta Tanjung Benoa-Bali*, 29 Nopember 2019; 54-63
- Agustina, A. 2019. Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2013-2017). Skripsi. Thesis. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
- Agoes, Sukrisno. 2018. *Pengantar Akuntansi Sektor Publik dan Auditing*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Demirag, I., & Khadaroo, I., 2019. Accountability And Value For Money: A Theoretical Framework For The Relationship In Public-Private Partnerships. *Journal Of Management & Governance*, Vol. 152 Pp. 271-296.
- Erawan, Ad. Dkk. 2018. Pemanan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 8 No. 3, Desember 2018; 187-193. Issn 2599-2651
- Mahmud, Abbas. 2017. Perwujudan Akuntabilitas Dan Transparansi Melalui Analisis *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Blitar (<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050577/jurnal-Akuntansi-Pemerintah/Pewujudan-Transparansi-Dan-Akuntabilitas-Publik-Melalui-Akuntansi-Sektor-Publik/Akuntabilitas-Publik-Transparansi.html>)
- Mardiasmo, 2018, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo., 2018, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Noordiawan, Putra, Rahmawati, 2018. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta
- Purwiyanti, Dewi. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Ffisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Jurnal Katalogis*, Vol 5 (3) 2017; 190-200.
- Renyowijoyo, Muindro. 2019. *Akuntansi Sektor Publik Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana

- Suharto, Harry. 2017. *Compliance Audit Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiawan, A. B., & Gustia, W. (2018). Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor. *Jurnal Akunida*, 2(2), 14-26.
- Abdullah, J. (2018). Pengaruh Penerapan Dimensi Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. *Gorontalo Accounting Journal*, 1(1), 10-20.
- Pramudita, A. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Value For Money Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Opd) Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Ibrahim, H. (2017). *Pengaruh Value For Money Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. *Skripsi*, 1(921412063).





**VARIABEL X1 (EKONOMI)
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN**

No	X1.1	X1.2	X1.3	Jumlah	rata-rata
1	5	5	4	14	4,67
2	5	5	5	15	5,00
3	3	4	5	12	4,00
4	4	5	4	13	4,33
5	4	5	4	13	4,33
6	5	5	5	15	5,00
7	4	4	4	12	4,00
8	4	4	4	12	4,00
9	4	4	4	12	4,00
10	5	5	4	14	4,67
11	4	5	5	14	4,67
12	4	5	5	14	4,67
13	4	5	4	13	4,33
14	4	4	4	12	4,00
15	5	5	4	14	4,67
16	4	4	4	12	4,00
17	4	5	4	13	4,33
18	4	5	4	13	4,33
19	4	4	5	13	4,33
20	4	4	4	12	4,00
21	5	4	4	13	4,33
22	4	5	5	14	4,67
23	5	5	4	14	4,67
24	5	5	4	14	4,67
25	4	5	5	14	4,67
26	4	5	4	13	4,33
27	4	5	4	13	4,33
28	4	5	4	13	4,33
29	5	4	5	14	4,67
30	4	5	5	14	4,67
31	4	3	3	10	3,33
32	4	5	4	13	4,33
33	5	4	5	14	4,67
34	4	5	4	13	4,33
35	5	5	5	15	5,00
36	4	4	4	12	4,00
37	4	4	4	12	4,00

38	5	4	4	13	4,33
39	4	5	4	13	4,33
40	5	5	5	15	5,00
41	4	5	4	13	4,33
42	4	4	4	12	4,00
43	4	5	5	14	4,67
44	5	5	5	15	5,00
45	5	4	4	13	4,33
46	3	3	3	9	3,00
47	5	5	5	15	5,00
48	4	4	4	12	4,00
49	4	5	5	14	4,67
50	4	4	4	12	4,00
51	5	4	3	12	4,00
52	4	4	4	12	4,00
53	4	5	5	14	4,67
54	4	4	4	12	4,00
55	4	4	5	13	4,33
56	5	5	4	14	4,67
57	4	4	4	12	4,00
58	3	3	3	9	3,00
59	4	5	5	14	4,67
60	5	4	5	14	4,67

**VARIABEL X2 (EFESIENSI)
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN**

No	X2.1	X2.1	X2.3	Jumlah	rata-rata
1	4	5	5	14	4,67
2	5	5	5	15	5,00
3	5	5	4	14	4,67
4	5	4	5	14	4,67
5	4	5	5	14	4,67
6	5	5	5	15	5,00
7	5	4	4	13	4,33
8	4	4	4	12	4,00
9	5	4	4	13	4,33
10	5	5	5	15	5,00
11	5	4	5	14	4,67
12	5	4	5	14	4,67
13	4	4	5	13	4,33
14	4	4	4	12	4,00
15	4	5	5	14	4,67
16	5	4	4	13	4,33
17	4	4	5	13	4,33
18	5	4	5	14	4,67
19	5	5	4	14	4,67
20	4	4	3	11	3,67
21	4	4	4	12	4,00
22	5	4	5	14	4,67
23	4	5	5	14	4,67
24	4	4	4	12	4,00
25	5	4	5	14	4,67
26	4	4	5	13	4,33
27	4	4	5	13	4,33
28	4	4	5	13	4,33
29	4	3	4	11	3,67
30	5	4	5	14	4,67
31	3	4	4	11	3,67
32	5	4	5	14	4,67
33	5	5	4	14	4,67
34	5	4	5	14	4,67
35	5	4	5	14	4,67
36	4	4	4	12	4,00
37	4	4	4	12	4,00
38	3	3	3	9	3,00

39	4	4	5	13	4,33
40	5	5	5	15	5,00
41	4	4	3	11	3,67
42	5	5	5	15	5,00
43	5	4	4	13	4,33
44	5	4	4	13	4,33
45	4	3	3	10	3,33
46	4	4	4	12	4,00
47	5	4	4	13	4,33
48	4	4	4	12	4,00
49	4	4	4	12	4,00
50	4	4	4	12	4,00
51	4	3	4	11	3,67
52	4	4	5	13	4,33
53	4	4	5	13	4,33
54	4	4	3	11	3,67
55	5	5	4	14	4,67
56	5	4	4	13	4,33
57	4	4	3	11	3,67
58	3	3	3	9	3,00
59	4	5	4	13	4,33
60	5	4	4	13	4,33

**VARIABEL X3 (EFEKTIVITAS)
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN**

No	X3.1	X3.2	X3.3	Jumlah	rata-rata
1	4	4	5	13	4,33
2	5	5	4	14	4,67
3	5	5	4	14	4,67
4	4	5	4	13	4,33
5	4	4	3	11	3,67
6	5	4	4	13	4,33
7	4	5	4	13	4,33
8	4	4	4	12	4,00
9	4	4	4	12	4,00
10	4	4	4	12	4,00
11	5	5	4	14	4,67
12	4	4	4	12	4,00
13	4	4	4	12	4,00
14	4	4	4	12	4,00
15	4	4	5	13	4,33
16	4	5	4	13	4,33
17	5	4	4	13	4,33
18	4	5	4	13	4,33
19	4	5	5	14	4,67
20	3	3	4	10	3,33
21	4	4	4	12	4,00
22	4	4	4	12	4,00
23	4	4	5	13	4,33
24	4	4	5	13	4,33
25	5	5	4	14	4,67
26	5	4	4	13	4,33
27	5	4	4	13	4,33
28	4	4	4	12	4,00
29	4	4	2	10	3,33
30	4	4	4	12	4,00
31	4	4	4	12	4,00
32	4	5	4	13	4,33
33	5	5	5	15	5,00
34	4	5	4	13	4,33
35	5	5	5	15	5,00
36	4	4	4	12	4,00
37	4	4	4	12	4,00
38	3	3	4	10	3,33

39	4	4	4	12	4,00
40	5	5	5	15	5,00
41	3	3	3	9	3,00
42	4	5	5	14	4,67
43	4	4	3	11	3,67
44	4	4	4	12	4,00
45	3	3	3	9	3,00
46	4	4	3	11	3,67
47	4	4	4	12	4,00
48	5	4	5	14	4,67
49	5	5	4	14	4,67
50	3	4	4	11	3,67
51	3	3	4	10	3,33
52	4	5	5	14	4,67
53	5	5	5	15	5,00
54	3	4	3	10	3,33
55	4	4	5	13	4,33
56	4	4	4	12	4,00
57	4	4	4	12	4,00
58	4	4	4	12	4,00
59	4	4	4	12	4,00
60	5	4	4	13	4,33

										4,25
24	4	5	5	5	5	5	4	4	37	4,63
25	4	5	5	5	4	5	5	5	38	4,75
26	4	4	4	4	5	5	3	4	33	4,13
27	4	4	3	3	5	5	3	4	31	3,88
28	4	3	3	3	4	4	3	3	27	3,38
29	5	5	5	5	5	4	4	4	37	4,63
30	4	4	4	4	5	5	4	4	34	4,25
31	3	3	3	3	3	4	3	3	25	3,13
32	4	4	4	4	5	5	4	5	35	4,38
33	4	5	4	4	5	4	5	5	36	4,50
34	3	4	4	4	5	5	4	5	34	4,25
35	4	3	3	3	5	5	5	5	33	4,13
36	5	5	4	5	5	4	4	4	36	4,50
37	4	5	4	4	5	4	4	4	34	4,25
38	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3,00
39	4	4	4	4	5	5	4	4	34	4,25
40	4	3	2	2	3	3	3	3	23	2,88
41	2	2	2	2	3	3	3	3	20	2,50
42	4	4	4	4	5	5	4	5	35	4,38
43	5	3	4	3	5	4	4	4	32	4,00
44	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4,13
45	3	3	3	3	5	5	5	5	32	4,00
46	3	3	3	3	5	4	4	4	29	3,63
47	4	4	4	4	5	5	5	5	36	4,50

48	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4,13
49	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4,13
50	2	1	5	4	5	4	4	4	29	3,63
51	2	2	2	2	3	3	3	3	20	2,50
52	4	4	3	3	4	3	3	4	28	3,50
53	4	4	4	4	5	5	5	5	36	4,50
54	3	3	3	3	3	4	4	4	27	3,38
55	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
56	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4,13
57	4	3	4	4	5	4	4	4	32	4,00
58	2	2	2	2	3	3	3	3	20	2,50
59	5	5	5	5	5	4	5	5	39	4,88
60	5	4	4	4	5	5	5	4	36	4,50

VARIABEL X1 (EKONOMI)

Case Processing Summary

Cases		N	%
		Valid	60
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,606	,603	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	4,2667	,54824	60
X1.2	4,5000	,59660	60
X1.3	4,2833	,58488	60

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,350	4,267	4,500	,233	1,055	,017	3
Item Variances	,333	,301	,356	,055	1,184	,001	3
Inter-Item Covariances	,113	,076	,161	,085	2,127	,002	3
Inter-Item Correlations	,336	,236	,461	,225	1,954	,011	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	8,7833	1,020	,320	,108	,631
X1.2	8,5500	,794	,494	,256	,381
X1.3	8,7667	,860	,436	,222	,473

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
13,0500	1,675	1,29438	3

VARIABEL X2 (EFESIENSI)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,656	,661	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	4,4000	,58802	60
X2.2	4,1500	,54695	60
X2.3	4,3333	,68064	60

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,294	4,150	4,400	250	1,060	,017	3
Item Variances	,369	,299	,463	164	1,549	,007	3
Inter-Item Covariances	,144	,125	,153	,027	1,216	,060	3
Inter-Item Correlations	,364	,381	,410	,029	1,075	,000	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	8,4833	,1068	,458	,211	,572
X2.2	8,7333	,1114	,451	,232	,548
X2.3	8,5500	,895	,474	,226	,560

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
12,8833	1,969	1,40329	3

VARIABEL X3 (EFEKTIVITAS)

Case Processing Summary

Cases		N	
		Valid	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,695	,698	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X3.1	4,1333	,59565	60
X3.2	4,2167	,58488	60
X3.3	4,0833	,61868	60

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,144	4,083	4,217	,133	1,033	,005	3
Item Variances	,360	,342	,383	,041	1,119	,006	3
Inter-Item Covariances	,156	,124	,208	,084	1,673	,002	3
Inter-Item Correlations	,435	,337	,597	,259	1,789	,016	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	8,3000	,953	,580	,372	,540
X3.2	8,2167	,986	,589	,389	,504
X3.3	8,3500	1,113	,396	,158	,747

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
12,4333	2,012	1,41860	3

VARIABEL Y (AKUNTABILITAS)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,884	,888	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1.1	3,9333	,77824	60
Y1.2	3,8667	,94719	60
Y1.3	3,8333	,86684	60
Y1.4	3,9167	,82937	60
Y1.5	4,5333	,74712	60
Y1.6	4,3167	,70089	60
Y1.7	4,0000	,63779	60
Y1.8	4,1333	,67565	60

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,067	3,833	4,533	,700	1,183	,061	8
Item Variances	,807	,407	,897	,490	2,206	,827	8
Inter-Item Covariances	,297	,157	,596	,439	3,795	,611	8
Inter-Item Correlations	,493	,243	,829	,586	3,406	,020	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	28,6000	16,786	,640	,619	,871
Y1.2	28,6667	16,395	,545	,588	,885
Y1.3	28,7000	15,637	,742	,741	,861
Y1.4	28,6167	15,529	,804	,797	,854
Y1.5	28,0000	16,780	,676	,544	,868
Y1.6	28,2167	17,596	,576	,474	,877
Y1.7	28,5333	17,711	,625	,585	,874
Y1.8	28,4000	17,261	,669	,668	,869

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
32,5333	21,473	4,63395	8

OUTPUT REGRESI

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	4,0693	,57941	60
X1	4,2505	,46602	60
X2	4,3003	,46650	60
X3	4,1048	,48972	60

Correlations

	Y	X1	X2	X3	
Pearson Correlation	Y	1,000	,327	,476	,392
	X1	,327	1,000	,954	,567
	X2	,476	,854	1,000	,684
	X3	,392	,567	,684	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	,005	,006	,001	,001
	X1	,005	,000	,000	,000
	X2	,000	,000	,000	,000
	X3	,001	,000	,000	,000
N	Y	60	60	60	60
	X1	60	60	60	60
	X2	60	60	60	60
	X3	60	60	60	60

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2 ^b		Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson	
					R Square Change	F	df1			df2
1	,508 ^a	,258	,218	,51240	,258	6,480	3	56	,001	1,553

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,104	3	1,701	6,480	,001 ^b
	Residual	14,703	56	,263		
	Total	19,807	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Coefficients^a

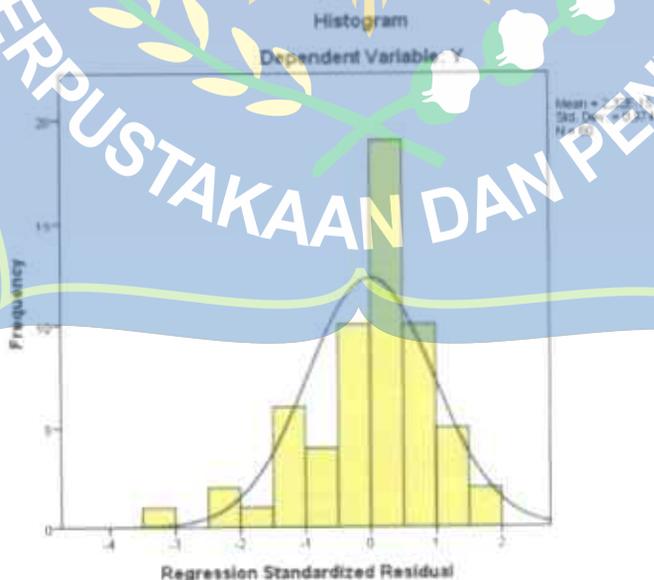
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,598	,669		2,390	,020					
	X1	-,361	,276	-,290	-1,309	,196	,327	-,172	-,151	,269	3,711
	X2	,803	,311	,646	2,580	,013	,478	,326	,297	,211	4,735
	X3	,135	,187	,114	,721	,474	,392	,006	,083	,531	1,885

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,1304	4,9169	4,0693	,29413	60
Std. Predicted Value	-3,192	2,882	,000	1,000	60
Standard Error of Predicted Value	,072	,346	,121	,054	60
Adjusted Predicted Value	3,3234	5,3664	4,0806	,31160	60
Residual	-1,60116	,96162	,00000	,49920	60
Std. Residual	-3,125	1,877	,000	,974	60
Stud. Residual	-3,263	1,938	-,010	1,017	60
Deleted Residual	-1,74633	1,02540	-,01131	,54695	60
Stud. Deleted Residual	-3,594	1,988	-,019	1,048	60
Mahal. Distance	,172	25,902	2,950	4,313	60
Cook's Distance	,000	,422	,026	,067	60
Centered Leverage Value	,003	,439	,050	,073	60

a. Dependent Variable: Y



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS

PUBLIK

Identitas Responden

Mohon dijawab sesuai dengan situasi sebenarnya, isilah titik-titik di bawah ini dan berilah tanda checklist (✓) pada salah satu jawaban yang Anda pilih!

1. Nama

2. Jenis kelamin

3. Pendidikan

Lulusan

Perempuahan

SMA

Diploma 3

Strata 1

Strata 2

Lainnya

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

1. Mohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda centang (✓) pada angka pilihan.

2. Pilihan Jawaban:

Sangat Setuju (SS)

Setuju (S)

Kurang Setuju (KS)

Tidak Setuju (TS)

Sangat Tidak Setuju (STS)

Pilihlah jawaban yang paling sesuai berdasarkan dengan pengalaman anda :

Value For Money (X)

No	Indikator	SS	S	KS	TS	STS
1	<p>Karya Desa ini memanfaatkan sumber daya secara optimal dengan menghasilkan output yang baik</p> <p>Rata-rata kegiatan pembelian barang dan jasa kantor desa ini memilih kualitas yang tinggi dengan harga yang rendah</p>					
2	<p>Dalam proses kerja atau kegiatan aparat desa ini harus memperhatikan penggunaan sumber daya yang sesuai dengan tujuan dan ketepatan waktu</p>					

Efisiensi							
4.	Pengadaan sumber daya di Kantor Desa ini sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah						
5.	Dalam kegiatannya Kantor Desa ini menghindari kegiatan atau pekerjaan yang tanpa tujuan atau kurang jelas						
6.	Proses pengelolaan anggaran Kantor Desa ini dapat menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimiliki						
Efektivitas							
	Kantor Desa ini dapat mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program-programnya yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang terendah						
8.	Sistem pengendalian manajemen pada Kantor Desa ini sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program						
	Laporan keuangan Kantor Desa ini dapat diukur dan dapat di pertanggungjawabkan mengenai efektivitas programnya						

Sumber

Mahmud (2017)



2. Akuntabilitas Publik (Y)

No	Indikator	SS	S	KS	TS	STS
Akuntabilitas Kejujuran & Hukum						
1.	Anggaran pada kantor desa ini disajikan secara transparansi, tepat waktu dan cepat					
2.	Penggunaan anggaran pada kantor desa ini didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku guna memberikan hasil pemerintahan yang baik					
3.	Akuntabilitas keuangan yang digunakan pada kantor desa ini dalam melakukan penyusunan anggaran tahun berikutnya jujur					
Akuntabilitas Proses						
4.	Pengalokasian anggaran pada kantor desa ini mengikuti proses dan prosedur yang berlaku					
5.	Laporan pertanggungjawaban dalam penyajian anggaran pada kantor desa ini harus tepat waktu dan menyertakan info dari masa lalu					
Akuntabilitas Program						
6.	Praktik pelaksanaan program yang dilakukan pada kantor desa ini dalam melakukan penyusunan anggaran behavior dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kinerja					
7.	Program pada kantor desa ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi untuk					
	menghasilkan kinerja yang maksimal					
8.	Program anggaran pada kantor desa ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus dapat mencapai target yang telah ditetapkan					

Sumber: Julius Saputra (2015)

LAMPIRAN PENGISIAN KUESIONER



Pengisian kuesioner oleh Staff Desa



Pengisian kuesioner oleh Kepala Desa



LAMPIRAN SURAT BALASAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAJENG
DESA PABBENTENGANG**

Alamat: Jl. Pttmaki Deso Numpangin Deso Pabbentengang Kab. Gowa Sulawesi

SURAT KEITERANGAN

Nomor: 259/Kep.11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menerangkan bahwa:

Nama	Lafiqul Muhaimin
Nomor NIK	405731129117
Program Studi	Administrasi
Fakultas	Humaniora dan Ilmu
Asal Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat Pengiriman	Desa Pabbentengang, Kec. Bajeng, Kab. Gowa

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa selama 10 hari, mulai dari hari Rabu, tanggal 18 Oktober s.d. 15 November 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi penelitian yang berjudul "PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA)".

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pabbentengang, 22 November 2021

Kepala Desa Pabbentengang



LAMPIRAN HASIL PLAGISI PER-BAB

Hasil Plagiasi BAB I

BAB I - Laksmi Prihatiningsih 105731129117



Submitted to Universitas Negeri Medan 4%

Hasil Plagiasi BAB II

BAB II - Laksmi Prihatiningsih 105731129117



repo.undiksha.ac.id 3%



Hasil Plagiasi BAB III

BAB III - Laksmi Prihatiningsih 105731129117



Hasil Plagiasi BAB IV

BAB IV - Laksmi Prihatiningsih 105731129117



Hasil Plagiasi BAB V

BAB V - Laksmi Prihatiningsih 105731129117

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE(S)

1 Misti Hariasih, Herlinda Maya Kumala Sari, Totok Dwi Prasetyo. "Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja, Kompetensi Karyawan dan Pengalaman Kerja terhadap Promosi Jabatan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Muallim Hayat Surabaya", JBM (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan), 2019

4%

Created by iThenticate

File: LaksmiPrihatiningsih

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSARUPT
PERPUSTAKAAN
DAN PENERBITANUPT
PERPUSTAKAAN
DAN PENERBITAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90222 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Laksmi Prihatiningsih
Nim : 105731129117
Jurusan : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Angka Batas
1	Bab 1	4%	10 %
	Bab 2	3%	25 %
	Bab 3	6%	10 %
	Bab 4	0%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 31 Desember 2021

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S Hum, M.I.P
NBM. 964 591

BIOGRAFI PENULIS



Penulis Skripsi yang berjudul "Pengaruh *Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*" bernama Laksmi Prihatiningsih, lahir di Dompu pada 17 Juli 1999 dari pasangan suami istri Bapak Ikbal dan Ibu Rohana. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Ikbal dan Rohana.

Penulis bertempat tinggal di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan yang di tempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 19 Woja lulus tahun 2011, SMP Negeri 1 Woja lulus tahun 2014, SMK Negeri 1 Dompu lulus tahun 2017, dan mulai tahun 2017 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.